**LAMPIRAN
PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL
KEPALA DAERAH**

**CHECKLIST PENGAWASAN DANA KAMPANYE
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

PETUNJUK PENGGUNAAN CHECKLIST

1. Panwaslu menggunakan *checklist* ini sebagai paduan dalam mengawasi dana kampanye pasangan calon dengan memberikan tanda centang pada kolom “YA” atau “TIDAK” sesuai dengan temuan fakta di lapangan.
2. Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan atas pertanyaan adalah “YA”, maka tidak dikategorikan sebagai pelanggaran.
3. Apabila berdasarkan temuan faktual di lapangan jawaban atas pertanyaan adalah “TIDAK”, maka dikategorikan sebagai pelanggaran.

A. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah pasangan calon memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)?			- Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. - Pasal 7 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010	
2	Apakah RKDK ditempatkan di bank pemerintah atau bukan bank pemerintah yang			Pasal 83 ayat (2) PerKPU Nomor 06	

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
	mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan perwakilan di kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota?			Tahun 2010.	
3	Apakah pasangan calon sudah menyerahkan rekening khusus ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			Pasal 83 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004.	
4	Apakah RKDK disampaikan dan/atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			- Pasal 84 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004. - Pasal 7 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
5	Dalam hal RKDK dibuat atas nama tim kampanye, apakah pasangan calon membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa RKDK pasangan calon tersebut atas nama tim Kampanye?			Lampiran PerKPU Nomor 06 Tahun 2010 huruf D dan Contoh Lampiran 1 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

B. PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara terbuka pengadaan jasa audit untuk melakukan audit laporan dana Kampanye?			Pasal 17 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
2	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama KAP kepada IAPI untuk mendapat masukan berkenaan persyaratan administrasi KAP?			Pasal 17 ayat (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
3	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan KAP memperhatikan masukan dari IAPI?			Pasal 16 ayat (1) dan (2) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
4	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota membuka akses terhadap data/berkas KAP yang ditetapkan?				
5	Apakah KAP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memenuhi persyaratan:				
	a. membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa tidak berafiliasi secara langsung maupun			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

	tidak langsung dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye.				
	b. membuat pernyataan tertulis di atas materai bahwa bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik yang mengusulkan pasangan calon.			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	c. telah mengikuti pelatihan audit dana kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan oleh IAPI yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lain.			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
	d. mendapatkan 1 (satu) surat rekomendasi dari IAPI untuk mengikuti proses pengadaan jasa audit pasangan.			Pasal 16 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
6	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tepat waktu dalam menetapkan dan mengumumkan KAP?				
7	Apakah KPU membatalkan penetapan KAP yang terbukti memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan persyaratan KAP? (lihat pertanyaan nomor 5)			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
8	Apakah KPU tidak melakukan pembayaran jasa kepada KAP yang			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (2)	

	telah dibatalkan?			PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
9	Apakah dalam hal terjadi pergantian KAP karena tidak memenuhi syarat, KPU menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit?			Bagian Keempat Pasal 22 ayat (3) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	

C. PEMBUKUAN DAN PENCATATAN DANA KAMPANYE

NO	MATERI PENGAWASAN	TEMUAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1	Apakah pasangan calon mempunyai pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?			Pasal 2 ayat (1) PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	
2	Apakah dana kampanye pasangan calon berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat dalam pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye?			Pasal 80 ayat (3) PerKPU Nomor 69 Tahun 2009.	
3	Apakah pembukuan khusus penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan calon terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon?			Pasal 80 ayat (3) PerKPU Nomor 69 Tahun 2009.	
4	Apakah pasangan calon dan/atau tim Kampanye mencatat semua penerimaan dan pengeluaran sumbangan			Pasal 8 PerKPU Nomor 06 Tahun 2010.	